

KAJIAN POLA KETERKAITAN FUNGSIONAL JAWA TENGAH - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh : Mursid Zuhri

(Peneliti pada BADAN LITBANG Propinsi Jawa Tengah)

ABSTRAC

The Purpose of this research to identify on correlation between region on boundary area in the Central Java and DIY which limit each other that focused on sub district in boundary area.

To reach this goal, we have to identify : a) potential of socio-economic on each area, b) the problems in each area, c) functional correlation between areas, d) the element to form correlation functional.

The result of this research show that no correlation functional happen in the most boundary areas between the Central Java and DIY. The element that cause no functional correlation are limit by homogen charateristic on the hill and most boundary area. Correlation functional only happen, between 1) Sub district Tempel (Sleman) with Sub district Salam, Sub district Ngluwar, Sub district Srumbung, 2) Sub district Cangkringan (Sleman) with Sub district Kemalang (Klaten), 4) Sub district Pracimantoro (Wonogiri) with Sub district Rongkop (Gunungkidul). Element to form correlation functional between the areas are : trading activities, industry, education, socio-culture.

Key Words : Growth, accompany, linkage spatial, development area, potential development and society welfare.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks ini sasaran pembangunan adalah peningkatan tingkat hidup masyarakat baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pembangunan dapat dilakukan melalui pendekatan wilayah (pembangunan wilayah) atau pendekatan sektoral (pembangunan daerah).

Pembangunan dengan pendekatan wilayah, lebih menekankan pada masalah-masalah yang ada pada suatu daerah, tanpa memperhatikan batasan secara administratif. Daerah-daerah yang mempunyai permasalahan sama dianggap satu wilayah pembangunan (walaupun secara administratif berbeda). Dapat terjadi satu wilayah pembangunan terdiri dari beberapa daerah administratif. Keterkaitan-keterkaitan ekonomi antar beberapa daerah administratif dapat membentuk satu wilayah fungsional dengan permasalahan yang sama. Pembangunan wilayah diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada dalam satu wilayah, sehingga peningkatan dan pemerataan hasil pembangunan tercapai.

Pembangunan daerah lebih menekankan pada pendekatan daerah secara administratif, dan pendekatan sektoral, yang diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar daerah perkotaan, antar daerah pedesaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah, serta pengembangan potensi daerah seoptimal mungkin. Serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan perlu dikembangkan (GHBN 1999).

Sampai Pelita VI, pembangunan di Indonesia lebih menekankan pada pendekatan pembangunan Sektoral yang didukung oleh

pendekatan perwilayahan yang lebih berorientasi administratif (wilayah administratif). Dilihat dari hasil-hasil pembangunan yang dicapai selama ini menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan, yakni telah terjadi transformasi ekonomi, yang dulunya berbasis pada agraris ke arah industri.

Transformasi struktur perekonomian nasional selama PJP I, sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi 53,92%, diikuti sektor jasa 34,03%, sektor industri 8,35% dan sektor pertambangan 3,6%. Kondisi ini berjalan terus sampai dengan tahun 1971.

Pada tahun 1972 mulai terjadi pergese-ran. Peran dominan sektor pertanian, diambil alih oleh sektor jasa, dimana kontribusi sektor pertanian turun menjadi 40,13%, sektor jasa naik menjadi 42,22% dan sektor industri menjadi 9,17%. Hal ini menunjukkan terjadinya proses transformasi yang mengarah pada struktur ekonomi yang seimbang. Transformasi yang demikian itu berlangsung terus sampai dengan akhir PJP I (1994). Sampai dengan tahun 1994 kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan rata-rata 3,37% sehingga kontribusi terhadap perekonomian nasional menjadi 17,40%. Sektor jasa mengalami kenaikan rata-rata 1,67% per tahun, sedangkan sektor industri mengalami kenaikan rata-rata 3,24%, sehingga kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian menjadi 58,70%, sedangkan sektor industri menjadi 23,9%. Perubahan yang demikian menunjukkan bahwa transformasi struktur perekonomian yang diidealkan oleh Clark Fisher, yaitu semakin mengecilnya kontribusi sektor pertanian sedangkan kontribusi sektor industri dan jasa semakin meningkat.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah

dalam PJP I telah mampu menciptakan transformasi ekonomi nasional, sehingga tercapai struktur ekonomi yang relatif seimbang (menurut istilah GBHN).

Kondisi ini diharapkan berjalan terus menerus, sehingga pangsa relatif sektor industri semakin meningkat sedemikian rupa, sehingga status Indonesia sebagai negara industri akan segera terwujud. Kondisi ini diproyeksikan akan tercapai sebelum akhir Pelita VI.

Namun demikian, sampai berakhirnya PJP I dan memasuki awal PJP II, perubahan struktur ekonomi tersebut tidak diikuti oleh transformasi struktur ketenagakerjaan nasional. Persentase tenaga kerja nasional di sektor pertanian sampai dengan berakhirnya PJP I masih tetap tinggi (46,15%) dengan rata-rata penurunan per tahun 0,70%. Sektor jasa menduduki urutan ke 2 (39,74%) dengan kenaikan rata-rata 9,15% per tahun. Sedangkan tenaga kerja nasional di sektor industri masih relatif rendah (13,21%), dengan peningkatan rata-rata 0,3% per tahun. Bila dihubungkan dengan struktur perekonomian nasional (Produk Domestik Bruto) harga berlaku empat sektor Ekonomi Nasional periode 1960-1998, terdapat ketimpangan distribusi tenaga kerja antar sektor. Pada akhir PJP I menunjukkan bahwa pangsa relatif tenaga kerja pada sektor pertanian, industri dan jasa masing-masing sebesar 17,40%, 13,2% dan 40,7%. Pangsa relatif sektor pertanian, industri dan jasa terhadap PDB masing-masing adalah 17,40%, 23,90% dan 58,70%.

Diperkirakan juga sampai akhir Pelita VI, ketimpangan ini masih terjadi, yakni persentase tenaga kerja yang ada di sektor pertanian, industri dan jasa masing-masing 43,96%, 14,28% dan 40,6%. Sedangkan pangsa relatif sektor pertanian, industri dan jasa masing-masing 16,58%, 25,98% dan 47,98%.

Sejalan dengan perubahan struktur ekonomi secara nasional, di tingkat regional Jawa Tengah-pun telah terjadi transformasi ekonomi.

Hal ini terlihat dari struktur ekonomi Jawa Tengah yang didominasi oleh tiga sektor ekonomi yang memberikan kontribusi cukup besar dalam PDRB Jawa Tengah. Pada tahun 1993 sumbangan sektor pertanian 24,56%, sektor industri pengolahan 28,15%, sektor perdagangan, restoran/hotel 20,01%.

Dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam kurun waktu 1988-1993 sebesar 6,83%, yang didukung oleh sektor listrik, gas dan air minum 14,69%, serta pertambangan dan galian 13,61%, sektor industri pengolahan 12,07%, sektor perdagangan, restoran dan hotel 9,92%, pengangkutan dan komunikasi 8,35%, sewa rumah 5,48%, bank dan lembaga keuangan lainnya 4,71%, bangunan 4,11%, pemerintahan dan pertanahan 2,45%, jasa-jasa 4,09% dan pertanian 2,36%. Selanjutnya dilihat dari struktur ketenagakerjaan tidak seimbang dengan perkembangan struktur ekonominya. Sektor pertanian masih menampung jumlah tenaga kerja terbesar, yakni sebanyak 52,12%, sektor industri 12,31%, dan sektor lainnya 35,57%. Dengan perbedaan struktur ini mengakibatkan produktivitas di sektor pertanian sangat rendah, yakni Rp. 943.981,00 per tenaga kerja per tahun, sedangkan produktivitas tenaga kerja rata-rata sebesar Rp. 1.615.615,00. Kualitas Tenaga Kerja yang dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, struktur yang ada juga bukan merupakan bentuk piramida yang baik. Tenaga kerja yang tamat SD ke bawah masih besar, yakni 83,38%, SLTP sebanyak 7,81%, SLTA 7,49% dan tamat Akademi/Perguruan Tinggi sebanyak 1,33%.

Walaupun pendekatan pembangunan yang lebih menekankan sektoral yang

didukung pendekatan perwilayahan administratif telah mampu menunjukkan kinerja perekonomian yang baik, akan tetapi kurang menjamin adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan dengan pendekatan wilayah/regional. Dengan pembangunan yang memperhatikan wilayah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah maupun kesenjangan individual.

Dalam kenyataannya, semakin pesatnya pembangunan semakin banyak aktivitas manusia melampaui batas administrasi pemerintahan dan semakin tinggi pula ketergantungan antar daerah.

Keterkaitan secara ekonomi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain cukup tinggi. Keterkaitan fungsional antar wilayah terjadi, bahkan ada wilayah yang berfungsi dominan bagi wilayah-wilayah di sekitarnya, sehingga secara ekonomis wilayah-wilayah yang lain tertarik pada wilayah tersebut (Fungsional Nodal). Keterkaitan secara ekonomis tersebut sangat memungkinkan terjadi di daerah perbatasan. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang digunakan selama ini perlu dikembangkan dengan pendekatan wilayah terutama untuk daerah perbatasan.

Daerah perbatasan Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah perbatasan yang memungkinkan terjadinya interaksi antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain (Spatial Linkage). Oleh karena itu, pembangunan daerah perbatasan tersebut perlu mendapat perhatian khusus.

Wilayah perbatasan Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang secara administratif terpisah. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang diterapkan berbeda-beda, karena tergantung kebijaksanaan pemerintah setempat, sehingga sering terjadi ketidak efektifan program. Oleh karena

itu kerjasama antara kedua daerah wilayah administratif dibutuhkan.

Untuk mewujudkan kerjasama antar kedua wilayah (atau lebih) perlu pengkajian pola keterkaitan fungsional antar wilayah. Dengan temuan pola keterkaitan fungsional antar wilayah tersebut dapat memberikan sumbangan bagi perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan.

B. BAHAN DAN METODE

Sejak awal 1980-an Indonesia mulai mengembangkan pendekatan terpadu "bottom up-top down", untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sustained development). Dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan tersebut orientasi pendekatan pembangunan wilayah sangat diutamakan. Pendekatan wilayah mencakup subsistem ekonomi, kelembagaan dan populasi. Subsistem ekonomi ditandai oleh pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi lainnya. Subsistem kelembagaan ditandai oleh ketersediaan lembaga, dukungan birokrasi serta akses wilayah. Subsistem populasi ditandai oleh kepadatan penduduk, mata pencaharian, unsur partisipatif penduduk, sosial seta budaya (Nasution, 1990).

Wilayah perbatasan merupakan suatu satuan (unit) geografi dengan batasan-batasan tertentu, yang sesuai dengan tujuan perwilayahan (delineasi) (Isard, 1962). Berdasarkan definisi tersebut dikenal empat tipe wilayah, yaitu (1) Wilayah Nodal, yang didasarkan pada struktur tata ruang wilayah yang didalamnya terdapat sifat ketergantungan fungsional, (2) Wilayah Homogen, yang didasarkan pada adanya kesamaan karakter atau homogenitas unsur-unsur dominan dalam wilayah yang bersangkutan, (3) Wilayah Perencanaan, yaitu wilayah yang karena sifat tertentu memerlukan keterpaduan

perencanaannya, seperti daerah aliran sungai (DAS), dan (4) Wilayah Administratif, yaitu wilayah yang ditetapkan berdasarkan sejarah, kepentingan administratif Pemerintah, perencanaan program, dan atau kepentingan politik (Nasution, 1990).

Sampai saat ini Indonesia, dalam penyusunan konsep wilayah lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan atau kepentingan administratif dan teritorial. Hal ini menyebabkan perwilayahan mengarah ke wilayah administratif sebagai tipe utama untuk segala kepentingan termasuk ekonomi (Sugidjoko, 1984; Nasution, 1990). Dengan menggunakan konsep wilayah administratif sebagai pola utama dalam pembangunan, maka pengoptimalan daya guna dan hasil guna pembangunan umumnya sulit dicapai. Menurut Todaro (1984) bahwa berhasilnya suatu program pembangunan wilayah ditentukan oleh keselarasan dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti program pembangunan wilayah hendaknya dapat mendorong pemanfaatan potensi ekonomi setempat. Oleh karena itu pendekatan dalam pembangunan daerah perbatasan, diperlukan penanganan khusus sesuai dengan karakteristik daerah perbatasan.

Kajian ini adalah keterkaitan fungsional wilayah perbatasan. Daerah perbatasan merupakan daerah yang berada di sekitar batas administratif dari 2 wilayah atau lebih. Daerah perbatasan mempunyai karakteristik relatif jauh dari pusat kekuasaan dan pusat pertumbuhan ekonomi, yang menjadikan daerah perbatasan relatif banyak permasalahan muncul antara lain : kemiskinan, produktivitas daerah yang rendah, kualitas sumberdaya manusia yang rendah, kurangnya fasilitas modern, gejala migrasi tinggi, serta kerawanan sosial. Oleh karena itu, perhatian khusus terhadap pengembangan daerah perbatasan sangat diperlukan.

Sampai dewasa ini kendala utama dalam pengembangan daerah perbatasan adalah kebijakan dan perencanaan pembangunan yang masih berorientasi pada batas wilayah administrasi. Untuk itu diperlukan pendekatan khusus dalam pengembangan daerah perbatasan, yaitu dengan menganggap wilayah perbatasan sebagai satu kesatuan wilayah pengembangan yang perlu ditangani secara bersama antar dua wilayah administratif, agar lebih efisien, lebih rasional, dan lebih mengacu pada pencapaian tujuan mensejahterakan komunitas perbatasan. Sejauh ini, pada aras pemerintah propinsi telah dilakukan Rapat Koordinasi Perbatasan bagi wilayah yang berdekatan.

Dalam kenyataannya, di daerah perbatasan, terdapat kemungkinan terjadinya keterkaitan fungsional antar daerah (Spatial Linkage), walaupun secara administratif daerah tersebut terpisah.

Keterkaitan fungsional wilayah ditunjukkan oleh tingkat interaksi antar bagian-bagian tertentu dari kedua wilayah yang saling berhubungan. Apabila interaksi antar wilayah yang satu dengan yang lainnya signifikan, maka keterkaitan fungsional wilayah terbentuk (Blair, 1991). Untuk mengetahui tingkat fungsional wilayah diperlukan indikator terukur (lihat tabel 2.1.)

Dalam penelitian ini tidak semua bidang di atas dikaji, tetapi yang diutamakan adalah hanya bidang ekonomi (Spatial Economic Linkage). Faktor bidang lain hanya sebagai informasi pendukung untuk memperkaya hasil kajian.

Untuk mengetahui keterkaitan fungsional, perlu kita mengidentifikasi keterkaitan nodalitas dalam suatu wilayah (Spatial). Menurut teori kutub pertumbuhan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan model pusat-pusat pertumbuhan, yang pernah populer sekitar tahun 1960-1970-an. Konsep

ini dikembangkan pertama kali oleh Pirroux, pada tahun 1955. Sebenarnya Pirroux mengakui kenyataan bahwa pembangunan tidak terjadi dimana-mana secara serentak, tetapi muncul di tempat tertentu dengan intensitas yang berbeda-beda. Tempat itulah yang ia namakan "titik-titik pertumbuhan" atau "kutub-kutub pertumbuhan". Dari titik-titik atau kutub-kutub pertumbuhan inilah pembangunan akan melalui berbagai saluran dan mempunyai akibat akhir yang berlainan untuk perekonomian secara keseluruhan.

Tabel 1.1. : Indikator Keterkaitan Sosial

BIDANG	INDIKATOR-INDIKATOR
1. Ekonomi	a. Arus barang komoditi dan barang jadi b. Arus modal c. Hubungan produksi d. Pola Konsumsi/Income
2. Fisik	a. Jaringan-jaringan transportasi b. Prasarana pelayanan umum c. Ketergantungan ekologis
3. Sosial Budaya	
a. Gerakan/mobilitas Penduduk	a. Migrasi sementara dan tetap, migrasi sirkuler
b. Interaksi sosial budaya	b. Interaksi group sosial
c. Politik dan administrasi	c. Arus anggaran pemerintahan d. Pola-pola otoritas, perijinan, supervisi/pengawasan

Berdasarkan pengamatan di atas, teori ini mengarahkan kepekaan untuk memusatkan investasi dalam sejumlah sektor tertentu sebagai sektor kunci di beberapa tempat tertentu. Dalam usaha memusatkan usaha pada sejumlah sektor dan tempat yang kecil diharapkan pembangunan akan menjalan pada sektor-sektor lain pada seluruh wilayah.

Dengan demikian sumber-sumber material dan manusia yang digunakan dapat dimanfaatkan lebih baik dan efisien.

Sektor kunci yang dimaksud dalam hal ini adalah sektor atau wilayah yang dapat mempengaruhi sektor atau wilayah lain dengan kaitan ke belakang maupun ke depan (backward and forward linkages).

Sektor ini sering dinamakan kesatuan yang memimpin dan mempengaruhi pemberdayaan kesatuan-kesatuan lain dengan stimulasi atau hambatan (polarisasi). Pengaruhnya adalah :

1. Mempengaruhi harga, dan arus pengharapan
2. Pengaruh/mempengaruhi kekuasaan dan pengaruh-pengaruh pemimpin
3. Mempengaruhi kecenderungan untuk konsumsi dan memberdayakan investasi
4. Mempengaruhi pertumbuhan pembangunan dan keuangan.

Polarisasi adalah proses pembesaran dari kutub, atau dalam arti yang lebih komprehensif adalah akibat stimulasi berasal dari integrasi yang sedang berjalan.

Konsep ini dapat diaplikasikan pada perekonomian nasional dan daerah. Dan untuk menerapkan teori kutub pertumbuhan harus terlebih dahulu mengetahui hirarki tempat-tempat kedudukan pusat. Selain itu untuk memilih kutub-kutub pertumbuhan dibutuhkan suatu pengetahuan tentang prasarana tempat kedudukan pusat dimaksud dalam waktu lampau, suatu pandangan kedepan dan pertimbangan-pertimbangan lokasi serta teknik juga perlu dipertimbangkan, seperti mudah dicapai (accessability), tersedianya sumber-sumber dan perubahan dari kelakuan dan sikap penduduk serta perubahan-perubahan teknologi.

Dari hasil temuan penelitian diharapkan memberikan masukan kebijakan pada peren-

canaan daerah dalam rangka pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada pada wilayah yang bersangkutan, yang didasarkan pada fakta yang berupa potensi sumber daya alam dan masyarakat yang ada disuatu wilayah.

Pengembangan wilayah dapat dilakukan lewat pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah pada dasarnya adalah pembangunan proyek-proyek berdasarkan hasil analisa data spatial. Jadi, pembangunan wilayah adalah pembangunan yang dilandasi oleh perwilayahan fakta-fakta. Wilayah-wilayah fakta inilah yang mencerminkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, yang selanjutnya akan mencerminkan kebutuhan anggota masyarakat tersebut.

Unit amatan atau obyek penelitian ini adalah semua Kecamatan-Kecamatan yang berada di wilayah perbatasan Wilayah Jawa Tengah - DIY; dengan Variabel Penelitian : Tingkat keterkaitan fungsional wilayah dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Ekonomi Ruang (Spatial Economic) yang dilihat dari sektor ekonomi (pertanian, industri dan jasa) yang saling terkait.
- b. Pola Hubungan produksi dalam spatial linkage daerah perbatasan yang dilihat dari keterkaitan antara masukan dengan keluaran.
- c. Potensi-potensi fisik dan prasarana (jaringan jalan, transportasi, ketergantungan ekologis).

Adapun responden dalam penelitian ini adalah pelaku ekonomi dari 3 sektor (pertanian, industri dan jasa). Jumlah dari masing-masing sektor disesuaikan dengan keadaan nyata di lapangan.

Data primer dikumpulkan dengan cara triangulasi, yaitu : (1) interview guide (2)

studi dokumenter dan (3) pengamatan. Interview guide digunakan untuk memperoleh data tentang sektor-sektor ekonomi yang membentuk keerkaitan fungsional diantara kedua wilayah. Sektor-sektor tersebut terdiri dari tiga kelompok yakni sektor pertanian, industri dan jasa. Sektor pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Sektor industri meliputi industri dan rumah tangga.

Sektor jasa meliputi perdagangan, transportasi dan perbengkelan.

Studi dokumenter digunakan untuk mengetahui potensi-potensi dan keterbatasan daerah di wilayah perbatasan baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Pengamatan digunakan untuk melihat tata ruang wilayah di daerah perbatasan Jawa Tengah-DIY dan untuk melihat kendala dan peluang pengembangan wilayah.

Untuk mengukur apakah terjadi keterkaitan fungsional ekonomis wilayah, dilakukan dengan analisis input-output (I-O) bagi wilayah yang terjadi keterkaitan fungsional. Indikator input-output meliputi : sektor pertanian, industri dan jasa. Sedangkan bagi daerah yang tidak memiliki keterkaitan fungsional wilayah akan dijelaskan dengan cara deskriptif dengan tetap memperhatikan spatial linkage pada wilayah perbatasan.

Selanjutnya dari hasil analisis tersebut akan dicoba menemukan kebijakan-kebijakan yang cocok untuk pengembangan wilayah tersebut (pengembangan terpadu).

C. HASIL

Wilayah perbatasan Jawa Tengah dengan DIY meliputi :

1. Perbatasan Klaten-Sleman

Kecamatan-kecamatan yang terletak di wilayah perbatasan Klaten-Sleman yaitu :

Kecamatan Prambanan, Kecamatan Manisrenggo (Klaten), Kecamatan Kemalang, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Prambanan (Sleman).

Diskripsi tentang potensi masing-masing kecamatan sebagai berikut :

a. *Wilayah Fungsional*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan secara geografis antar kecamatan di wilayah perbatasan tidak selalu menimbulkan keterkaitan secara fungsional. Hanya keterkaitan beberapa kecamatan wilayah perbatasan yang menunjukkan keterkaitan fungsional, yaitu :

1. *Kecamatan Prambanan (Klaten) - Kecamatan Prambanan (Sleman)*

Kecamatan Prambanan (Klaten) dan kecamatan Prambanan (Sleman) terinteraksi dalam perdagangan. Banyak pedagang kecamatan yang satu menuju atau menjual barang dagangan di kecamatan yang lain. Biasanya mereka berdagang barang kebutuhan sehari-hari, dan kerajinan rumah tangga. Interaksi juga terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Candi Prambanan. Lokasi parkir untuk obyek wisata milik Klaten, sedangkan Candi Prambanan milik Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi ini menimbulkan berbagai masalah, misalnya adalah retribusi, pemeliharaan dan sebagainya. Namun masalah-masalah tersebut sudah dapat diatasi melalui rapat koordinasi perbatasan.

2. *Kecamatan Kemalang, Manisrenggo (Klaten)-Kecamatan Cangkringan (Sleman)*

Hubungan fungsional antara 2 kecamatan ini terbentuk di sektor

perdagangan. Kemalang dan Manisrenggo sebagai pemasok bahan baku untuk industri-industri rumah tangga di kecamatan Cangkringan, sebaliknya Cangkringan sebagai pemasok kebutuhan sehari-hari bagi penduduk Kemalang, Manisrenggo. Kondisi ini ditandai dengan berkembangnya pasar di perbatasan antara Kecamatan Kemalang dan Manisrenggo dengan Kecamatan Cangkringan. Pasar ini mula-mula didirikan di Kecamatan Cangkringan, namun dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah kecamatan Kemalang dan Manisrenggo yang berdekatan.

Permasalahan yang muncul :

- Munculnya isu ketidakadilan di kalangan pedagang, khususnya dalam hal penarikan retribusi. Pedagang yang bermukim di wilayah kecamatan Cangkringan ditarik retribusi, sedangkan yang bermukim di kecamatan Manisrenggo tidak ditarik retribusi karena bukan wewenang kecamatan Cangkringan, padahal letaknya berdekatan hanya dipisahkan oleh jalan.

Jumlah Pasar di Kecamatan Cangkringan dan Kemalang

Jenis pasar	Kecamatan Cangkringan	Kecamatan Kemalang
Pasar Umum	2	1
Pasar Ikan	11	-
Pasar Hewan	-	-
Pasar Bangunan Permanen	2	1
Toko	5	8
Kios	251	151
Warung	25	20

Lembaga Ekonomi Penunjang

Jenis pasar	Kecamatan Cangkringan	Kecamatan Kemalang
Koperasi Simpan Pinjam	5	9
Koperasi Unit Desa	1	1
Bank	1	1

- Ketidak seragaman pola tanam (tataguna lahan)

Kecamatan Cangkringan sebagai pemasok kebutuhan air DIY, untuk itu tanaman yang cocok adalah tanaman keras, kenyataannya untuk daerah di atasnya justru ditanam rumput gajah untuk makanan ternak.

- Masalah Pendidikan (sekolah)

Masyarakat perbatasan kecamatan Cangkringan membutuhkan sekolah, tetapi apabila didirikan sekolah (SLTP), jumlah siswa kurang memenuhi. Kekurangan ini sebenarnya dapat direkrut dari kecamatan lain.

Perbandingan Jumlah Sekolah di Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Kemalang.

Jenis	Kecamatan Cangkringan			Kecamatan Kemalang		
	Jml	Murid	Guru	Jml	Murid	Guru
- Taman Kanak Kanak	12	306	33	6	166	9
- Sekolah Dasar	20	2.674	219	29	4.250	267
- SLTP	5	1.392	124	5	2.288	128
- SLTA						
- SMU	1	119	28			
- SMK	1	520	49			
- Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-	-

b. Wilayah Homogen

Wilayah homogen tercermin pada keterkaitan antara kecamatan Ngemplak dengan Kecamatan Srumbung. Dua kecamatan yang berdekatan ini mempunyai ciri yang sama, sehingga tidak terjadi interaksi ekonomi yang significant.

Transportasi yang menghubungkan dua daerah tersebut sangat terbatas sekali.

Homoginitas daerah berupa :

- sama-sama daerah pertanian
- Kondisi geografis sama
- Hasil daerah relatif sama

2. Perbatasan Klaten-Gunungkidul

Wilayah perbatasan Klaten dengan Gunungkidul meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Gantiwarno (Klaten), Kecamatan Ngawen (Gunungkidul). Secara geografis Kecamatan Ngawen berdekatan dengan kecamatan Bayat dan kecamatan Cawas, tetapi tidak terjadi interaksi ekonomi antar kecamatan tersebut. Tidak terjadinya antar kecamatan disebabkan : batas antar wilayah berupa bukit, tidak ada transportasi umum yang menghubungkan wilayah tersebut kecuali jalan setapak. Namun demikian ada penduduk kecamatan Ngawen yang seringkali memanfaatkan fasilitas yang ada di Kecamatan Bayat dan Kecamatan Ngawen yang seringkali memanfaatkan fasilitas yang ada di Kecamatan Bayat dan Kecamatan Cawas misalnya pasar, perbengkelan dan sebagainya. Mereka menuju kecamatan Bayat atau Cawas dengan berjalan kaki melalui jalan setapak. Biasanya mereka membawa hasil panen untuk dijual ke pasar Bayat atau Cawas, pulang mereka membawa barang kebutuhan sehari-hari. Apabila ada jalan umum dan sarana transportasi yang memadai yang menghubungkan kecamatan Ngawen dengan kecamatan Bayat, Cawas dan

Gantiwarno dimungkinkan terjadinya interaksi ekonomi antar wilayah.

Jenis	Cawas	Gantiwarno	Bayat	Ngawen
- Pasar Umum	10	5	2	2
- Pasar Permanen	1	1	1	2
- Pasar tanpa bangunan	2	1	2	1
- Pasar Hewan	-	1	1	1
- Toko	99	-	21	70
- Kios	120	76	202	35
- Warung	221	174	8	244
- Pasar Ikan	-	-	1	-

3. Perbatasan Wonogiri

Wilayah perbatasan Wonogiri dengan Gunungkidul meliputi wilayah Kecamatan Pracimantoro (Wonogiri) dan Kecamatan Rongkop (Gunungkidul). Fasilitas umum (pasar, sekolah, transportasi, hiburan dan lain-lain) di kecamatan Pracimantoro lebih lengkap dibanding kecamatan Rongkop. Akibatnya aktivitas ekonomi kecamatan Rongkop tertarik ke kecamatan Pracimantoro.

4. Perbatasan Magelang-Sleman

Kecamatan Tempel (Sleman) berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi bagi kecamatan-kecamatan perbatasan yang lain (wilayah Magelang). Masyarakat kecamatan Salam, Ngluwar dan Srumbung menjual hasil pertanian (salak, tembakau) dan barang kelontong ke Tempel. Mereka juga membeli barang kebutuhan sehari-hari di pasar tempel. Fasilitas sekolah di Kecamatan Salam, Srumbung dan Ngluwar sangat terbatas, sedangkan kecamatan Tempel lebih memadai. Oleh karena itu banyak anak-anak usia sekolah yang menempuh pendidikan di Tempel.

5. Perbatasan Purworejo-Kulonprogo

Kecamatan-kecamatan di wilayah perbatasan Purworejo (Kaligesing), Loano dan Bagelen, Purwodadi) dengan Kulonprogo (Temon, Kokap, dan Girimulyo) merupakan wilayah yang homogen. Homogenitas wilayah ini dicirikan dengan struktur tanah yang sama. Tidak terjadi interaksi ekonomi antar kecamatan, karena perbatasan antara Purworejo dan Kulonprogo berupa bukit yang sulit dijangkau. Satu-satunya jalan yang menghubungkan Purworejo dengan Kulonprogo hanya jalan utama Purworejo-Yogyakarta.

Pemasalahan intern yang muncul :

- Kecamatan-kecamatan di wilayah perbatasan ini merupakan daerah kering
- Banyak anak-anak di bawah umur sudah bekerja
- Produktivitas (khususnya sektor pertanian) rendah
- Tingkat pendidikan penduduk rata-rata rendah

E. PEMBAHASAN

Sebagian besar wilayah perbatasan Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terdapat keterkaitan fungsional. Faktor penyebab tidak terjadinya keterkaitan fungsional karena batas antar wilayah tersebut berupa bukit atau wilayah yang bersifat homogen. Wilayah-wilayah perbatasan yang terjadi keterkaitan fungsional yaitu :

a. Perbatasan Sleman Klaten

Wilayah kecamatan Cangkringan dengan kecamatan Kemalang, wilayah kecamatan Prambanan (Sleman) dengan wilayah kecamatan Prambanan (Klaten).

b. Perbatasan Sleman-Magelang

Keterkaitan fungsional terjadi di wilayah kecamatan Tempel (Sleman)

dengan kecamatan Srumbung, Ngluwar dan Salam (Magelang).

c. Perbatasan Kabupaten Gunung Kidul - Wonogiri

Keterkaitan fungsional terjadi antara kecamatan Rongkop (Gunungkidul) dengan kecamatan Pracimantoro (Wonogiri).

Faktor penunjang Keterkaitan fungsional antara daerah tersebut antara lain : aktivitas perdagangan, industri, pendidikan dan sosial budaya.

Wilayah-wilayah perbatasan yang tidak terjadi keterkaitan fungsional yaitu :

a. Perbatasan Purworejo-Kulonprogo

Hampir semua wilayah perbatasan antara Kulonprogo dengan Purworejo tidak terjadi keterkaitan fungsional. Wilayah perbatasan meliputi kecamatan Temon, kecamatan Kokap, kecamatan Girimulyo (kabupaten Kulonprogo), kecamatan Purwodadi, kecamatan Bagelen, kecamatan Kaligesing, kecamatan Loano (kabupaten Purworejo).

Keterkaitan fungsional tidak terjadi karena batas wilayah tersebut berupa bukit, dan kondisi geografis yang sama (sama-sama daerah pertanian yang kering).

b. Perbatasan Sleman Magelang

Antara kecamatan Ngemplak (Sleman) dengan kecamatan Srumbung (Magelang) tidak terjadi keterkaitan fungsional karena wilayah ini merupakan wilayah homogen. Keduanya merupakan daerah pertanian dengan kondisi geografis dan hasil pertanian yang sama.

c. Perbatasan Gunung Kidul - Klaten

Batas wilayah perbatasan Gunungkidul dengan Klaten berupa bukit. Oleh karena itu tidak terjadi keterkaitan fungsional antar kecamatan di perbatasan di perbatasan kedua wilayah tersebut.

Namun demikian antar kecamatan tersebut dapat terjadi hubungan fungsional apabila ada transportasi yang menghubungkannya. Kecamatan perbatasan meliputi kecamatan Ngawen (Gunungkidul), kecamatan Bayat, kecamatan Cawas dan kecamatan Gantiwarno (Klaten).

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi daerah-daerah perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Masalah-masalah tersebut antara lain :

1. Potensi sektor pertanian belum dapat dioptimalkan. Masalah air merupakan kendala utamanya.
2. Usaha ternak belum mampu berperan sebagai pendukung.
3. Di kecamatan-kecamatan perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta banyak terjadi anak-anak usia sekolah harus bekerja, sehingga produktivitas mereka rendah.

Di samping itu tingkat pendidikan mereka relatif rendah. Banyak penduduk yang hanya tamat Sekolah Dasar. Tidak Tamat Sekolah Dasar, bahkan masih banyak yang tidak sekolah. Kondisi ini terjadi di kecamatan Temon, Kokap, Girimulyo (Kulon Progo), kecamatan Ngawen, Rongkop (Gunung Kidul), kecamatan Cawas, Bayat (Klaten), kecamatan Kaligesing, Loano (Purworejo).

Implikasi Kebijakan :

a. *Persoalan Geografis*

Persoalan utama di daerah perbatasan Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta adalah "Persoalan geografis", yang sebagian besar tata guna tanahnya adalah lahan kering, sehingga berpengaruh terhadap produktivitas pertanian yang

relatif rendah, sebagai akibat belum adanya “Political Will” dari pemerintah untuk mengembangkan lahan kering. Sejauh ini Political Will pemerintah baru “bergerak” di sektor lahan basah (sawah).

Kondisi seperti ini hampir ditemui di semua daerah perbatasan (antar kecamatan yang berbatasan), padahal sementara itu banyak penduduk yang masih bekerja di sektor pertanian. Akibatnya kehidupan penduduknya relatif miskin. Berangkat dari kemiskinan itulah banyak masyarakat setempat melakukan migrasi (baik permanen maupun migrasi serkuler). Sementara yang lain tetap bergelut dengan pola pertanian yang produktivitas relatif rendah tersebut.

Bertitik tolak dari kenyataan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- 1) Pemerintah perlu memperhatikan secara serius pengembangan pengelolaan lahan kering, agar lahan kering tersebut produktivitasnya dapat ditingkatkan/atau dioptimalkan.
- 2) Berdasarkan pengalaman peneliti di lapangan menunjukkan bahwa persoalan utama lahan kering adalah sulitnya/terbatasnya air untuk irigasi bahkan untuk minum. Untuk mengatasi persoalan tersebut kiranya perlu dipikirkan penggunaan teknologi canggih dalam mengadakan salinisasi air laut menjadi air tawar yang siap dikonsumsi untuk masyarakat baik untuk irigasi maupun untuk minum.
- 3) Bertitik tolak dari kemiskinan yang terjadi, banyak penduduk yang ada di perbatasan relatif rendah tingkat pendidikannya. Oleh karena itu kiranya perlu dipikirkan oleh pemerintah lewat Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan ketrampilan mereka lewat pendidikan khusus (seperti perbeng-

kelan, pertukangan dan keahlian lain yang spesifik yang dibutuhkan oleh pasar). Selain itu juga perlu didirikan sekolah formal kejuruan untuk wilayah perbatasan, di luar sekolah menengah umum yang sekarang telah banyak berkembang, seperti sekolah teknologi dan sekolah ekonomi, atau kejuruan lain untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih baik di sektor formal atau non formal.

- 4) Persoalan lain yang masih terkait dengan faktor geografis yakni banyak batas wilayah di antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah itu disekat oleh pegunungan, sehingga banyak daerah perbatasan dalam hal transaksi ekonomi tertarik ke “Growth Pole” (pusat-pusat pertumbuhan) di daerahnya, sehingga tidak terjadi keterkaitan fungsional di antara kedua daerah (antar kecamatan DIY-Jateng). hal ini mengakibatkan banyak transaksi ekonomi menjadi lebih mahal/tinggi. Oleh karena itu, kiranya perlu pemerintah mendekatkan berbagai “fasilitas pembangunan” untuk kelompok mereka yang ada di perbatasan, misalnya menyediakan rute Bis Damri ke daerah perbatasan yang terpencil tersebut. Penyediaan sarana tersebut akan membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan kawasan di daerah yang bersangkutan.

b. Persoalan Pengembangan Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi utama di wilayah perbatasan DIY dan Jawa Tengah adalah relatif homogen, yakni produksi pertanian baik dari lahan sawah maupun lahan kering berupa produksi bahan makanan, tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran. Selain itu

juga penghasil/produksi ternak baik ternak besar maupun kecil.

Oleh karena itu pengembangan potensi ekonomi di sekitar perbatasan akan lebih baik jika pemerintah (dalam konteks ini pemerintah DIY dan Jawa Tengah bekerjasama untuk menjadi pioner) membentuk BUMD yang bergerak di sektor industri pengolahan atas hasil-hasil pertanian (agro industri) secara profesional yang betul-betul ditangani secara serius. Dengan pendirian agroindustri tersebut akan dapat meningkatkan "rising demand" terhadap hasil-hasil pertanian, sehingga akan memberikan nilai tambah bagi petani, atau paling sedikit mengatasi persoalan pasar tersebut nampaknya keterbelakangan, kemiskinan, keterbelengguan sulit untuk diatasi.

c. Persoalan pengembangan Pariwisata

Banyak potensi pariwisata antara DIY dan Jawa Tengah yang perlu dikoordinasikan secara baik, agar potensi pariwisata dapat dioptimalkan dengan membentuk suatu rute Package Tour Jawa Tengah - DIY dengan beragam alternatif.

- 1) Keraton Solo - Candi Prambanan - Keraton Yogyakarta - Candi Borobudur - Solo.
- 2) Keraton Solo - Candi Prambanan - Menyusur lewat Kabupaten Gunung Kidul (Wonosari) yang kaya dengan bukit-bukit kecil indah/alami sebagai wisata alam - Wonogiri (waduk dan pegunungan) - ke Solo.
- 3) Semarang - Candi Borobudur - Keraton Yogyakarta - Candi Prambanan - Keraton Solo.

Pada umumnya orang berpariwisata ingin menghilangkan kejenuhan dari rutinitas, oleh karena itu tour perlu dilewatkan pada jalan-jalan yang

bernuansa pegunungan. Oleh karena itu disarankan sepanjang jalan ke arah Wonosari - Wonogiri sebagai salah satu alternatif yang cukup menarik. Selain itu juga jalan alternatif dari Magelang menyusur lewat perbukitan di sekitar Magelang Kopeng dan Solo - Selo - Borobudur cukup menarik untuk dilewati suatu Package Tour.

d. Spatial Antar Kecamatan Perbatasan

- 1) Kecamatan Tempel (Kabupaten Sleman) - kecamatan Salam, kecamatan Ngluwar, kecamatan Srumbung (Kabupaten Magelang) mempunyai keterkaitan fungsional wilayah. Salah satu faktor utama terjadinya keterkaitan fungsional tersebut karena keberadaan Pasar Tempel. Keberadaan pasar Tempel sudah representatif, hal tersebut dapat ditunjukkan melalui :
 - (a) Sarana bangunan pasar sudah memadai dan adanya rencana pengembangan-pengembangan pasar untuk menampung pedagang yang masih di luar.
 - (b) Dari sisi prasarana telah adanya lembaga keuangan desa dan perbankan yang memadai, sehingga keberadaannya perlu didukung oleh semua pihak termasuk masyarakat Salam, Ngluwar dan Srumbung
- 2) Kecamatan Cangkringan (Kabupaten Sleman) - Kecamatan Kemalang, Kecamatan Manisrenggo (Kabupaten Klaten) mempunyai keterkaitan fungsional wilayah. Persoalan yang muncul didaerah tersebut adalah masalah penerapan retribusi di pasar Cangkringan. Keberadaan pasar Cangkringan yang terletak di perbatasan langsung dengan kecamatan Kemalang

(Kabupaten Klaten) sekalipun kecil namun memiliki peran penting bagi masyarakat sekitar. Namun persoalan muncul ketika pihak kecamatan Cangkringan menerapkan retribusi. Sifat pasar Cangkringan yang semi permanen dan terletak persis di perbatasan yang berupa jalan, menyebabkan para pedagang mulai banyak beralih ke seberang jalan yang masuk wilayah kecamatan Kemalang. Padahal beberapa bangunan pertokoan permanen sudah berdiri di wilayah Kecamatan Cangkringan. Sementara itu pihak kecamatan Kemalang tidak menarik redistribusi apapun.

Untuk itulah direkomendasikan perlu dibuat kesepakatan antara kecamatan Cangkringan-kecamatan Kemalang atas keberadaan pasar, misalnya dengan membangun pasar di kedua belah pihak. Serta membuat perlakuan yang sama atau menetapkan peraturan yang sama untuk pengguna kedua pasar tersebut dalam penerapan retribusinya.

- 3) Masalah tata guna tanah antara kecamatan Cangkringan (DIY) dengan wilayah Kabupaten Boyolali. Kecamatan Cangkringan bagi Propinsi DIY merupakan daerah yang digunakan sebagai cadangan air. Oleh sebab itu lereng gunung Merapi yang masuk wilayah kecamatan Cangkringan digunakan untuk hutan atau tanaman keras. Sementara itu lereng gunung Merapi yang masuk wilayah Kabupaten Boyolali, ditanami dengan rumput gajah.

Oleh karena itu perlu direkomendasikan pemanfaatan wilayah lereng gunung Merapi antara kedua belah pihak. Misalnya dengan memanfaat-

kannya (secara bersama) menjadi hutan (tanaman keras). Dan memberikan kompensasi yang memadai bagi areal yang ditanami rumput gajah, misalnya dengan mencari lahan pengganti.

Masalah pendidikan, sarana pendidikan di Kecamatan Cangkringan lebih memadai dari pada kecamatan Kemalang. Di samping itu lokasi sekolah di kecamatan Cangkringan relatif dekat bagi masyarakat perbatasan kecamatan Kemalang. Sehingga warga kecamatan Kemalang di perbatasan banyak yang sekolah di kecamatan Cangkringan. Persoalan yang muncul adalah tentang perijinan yang harus diselesaikan sampai tingkat tertentu.

e. Daerah-Daerah yang tidak memiliki Hubungan Fungsional

Daerah-Daerah yang tidak memiliki hubungan fungsional adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Kalibawang (Kabupaten Kulon Progo) - Kecamatan Borobudur (Kabupaten Magelang).
- 2) Kecamatan Temon, Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo (Kabupaten Kulon Progo) - Kecamatan Bagelen, kecamatan Loano, kecamatan Kaligesing (Kabupaten Purworejo).
- 3) Kecamatan Pracimantoro (Kabupaten Wonogiri) - Kecamatan Rongkop (Kabupaten Gunung Kidul).
- 4) Kecamatan Semin (Kabupaten Gunung Kidul) - Kecamatan Weru (Kabupaten Sukoharjo).
- 5) Kecamatan Ngawen (Kabupaten Gunung Kidul) - Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, kecamatan Gantiwarno (Kabupaten Klaten).

Pada umumnya kendala fungsional

karena alasan geografis, seperti bukit dan karakteristik daerahnya adalah :

- pendidikan rendah
- penduduk usia sekolah bekerja
- Mata pencaharian utama pertanian dengan produktivitas rendah

Dapat dikatakan bahwa terdapat permasalahan yang serupa di daerah perbatasan seperti termasuk di atas, yaitu tingkat pendapatan rendah. Upaya memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat bisa dilakukan dengan mengadakan koordinasi untuk menentukan langkah strategis yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama.

F. KESIMPULAN

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa tidak semua daerah perbatasan terjadi keterkaitan fungsional. Oleh karena itu kebijakan spatial yang ditempuh dalam rangka pengembangan wilayah secara fungsional, pertama, lebih dulu perlu dilihat karakteristik hubungan antara dua titik tumbuh yang berdekatan. Kemungkinan yang terjadi adalah adanya keterkaitan fungsional, potensi fungsional dan tidak terjadi keterkaitan fungsional. Kedua, untuk mengembangkan wilayah fungsional seperti tersebut di atas, dibutuhkan dana pembangunan. Dalam konteks ini, kebutuhan dana pembangunan perlu pepaduan antara dana propinsi, Kabupaten dan bahkan pemerintah pusat, mengingat pendanaan melalui daerah ternyata relatif terbatas akibat dari : (1) adanya perbedaan prioritas masing-masing daerah dalam pembangunan (2) masing-masing daerah lebih banyak mengkontribusikan dananya ke pusat-pusat pertumbuhan utama dan (3) kurangnya koordinasi yang efektif.

G. UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan hasil penelitian ini dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama yang baik dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan pelayanan dari berbagai pihak terutama Pemerintah Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Purworejo, Wonogiri, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul, yang telah membantu selama pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Baumol, Wj. 1977, *Economic Theory and Operation Analysis*. Prentice hall, Inc, New Jersey
- Blair, John P, 1991, *Urban and Regional Economics, Regional Economics*, Richard Irwin Inc, Boston.
- Friedmand, J And Clyde Weaver, 1979, *Territory and Function the Evolution or Regional Planning* Edward Arnold Publisher Ltd London.
- Hover, Edgar M and Frank Giarratani, 1985, *An Intoduction To Regional Economic*, Alfred, New York.
- Irsad, W. 1962, *Introduction to regional Science*, John Hopkins Press, London.
- Kameo, D. dan P. Rietvelt, "Regional Income Disparities in Indonesia, a comment", *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 35 No. 4, 1987, pp. 451 - 459.
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Perencanaan*, BPFE, Yogyakarta.
- Nasoetion, Lutfi Ibrahim, 1979, *Perencanaan Pengembangan Regional sebagai suatu pendekatan terpadu*, Ceramah di departemen Ilmu-ilmu Tanah IPB, tanggal 2 Nopember

- dan T. Hanafiah, 1979, perencanaan Pengembangan regional Sebagai Suatu Pendekatan Terpadu. Ceramah di departemen Ilmu Tanah IPB, tanggal 2 Nopember
- , 1985, Dasar dan Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan, Departemen Dalam Negeri dengan Jurusan Tanah IPB.
- , 1983, Model Simulasi Sebagai Alternatif Model Dalam Analisa Wilayah IPB;
- J.M. Van Staveren and D.B.W.M. Van Dusseldorp, Framework for Regional Planning in developing Countries, 1983. Pemda Tingkat I Jateng, RUPTD 1994/1995 Republik Indonesia, Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 Tap MPR Nomor II/MPR/1993
- Rondenelli, Denis, 1983 Applied Methods of Regional Planning : The Urban Functions in Rural Development Approach. Clark University/Institute for development Anthropology Cooperative Agreement, Worcester.
- Sugidjoko, Soegijanto, 1984, Berbagai Tantangan dalam Pembangunan di negara Berkembang. Pusdiklat Dep. PUTL, Jakarta.
- Tjondronegoro, SMP, 1984 Social organization and Planned Development In Rural Java : A Study of The Organizational Phenomenon In Kecamatan Cibadak, West Java and Kecamatan Kendal Central Java, Oxford University Press, Singapore.
- Todaro, Michael D, 1984, Economic Development in The Thirt World, Longman, New York & London.